

Judul : Belajar Tatap Muka Digelar Terbatas
Tanggal : Jumat, 19 Maret 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

PEMBUKAAN SEKOLAH

Belajar Tatap Muka Digelar Terbatas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana menggelar uji coba kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas di sejumlah daerah pada triwulan II-2021. Selanjutnya, kegiatan tatap muka terbatas akan diperluas mulai Juli sembari melakukan evaluasi untuk penerapannya secara penuh dan nasional.

"Dari total 8.000 guru di Makassar, apabila semuanya telah selesai (divaksinasi), kita harapkan nanti akan ada uji coba tatap muka terbatas. Kemudian pada Juli juga akan dilakukan lagi untuk masuk ke sekolah, tetapi juga dengan program tatap muka terbatas. Dari situlah nanti kita evaluasi, apakah bisa dilakukan tatap muka penuh, mungkin pada bulan-bulan setelah itu," kata Presiden Joko Widodo sesui meninjau vaksinasi terhadap 500 guru di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/3/2021).

Presiden berharap proses vaksinasi bisa dipercepat dan diperluas. Untuk itu, ia telah menginstruksikan kepada Komite Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi.

Secara nasional, pemerintah menargetkan vaksinasi menasar 181,55 juta warga atau 67 persen dari total po-

Ada tiga variabel yang semestinya berlaku untuk semua daerah sebelum pembelajaran tatap muka digelar

Darmaningtyas

pulasi penduduk Indonesia. Vaksinasi bertahap direncanakan selesai dalam 15 bulan sejak Februari 2021.

Vaksinasi tahap pertama telah selesai dilakukan terhadap 4,7 juta jiwa, mencakup tenaga kesehatan, polisi, dan tentara.

Tahap kedua, targetnya mencapai 40,35 juta jiwa mencakup petugas kesehatan yang belum terjaring di tahap pertama, petugas pelayanan publik, dan kelompok lanjut usia. Guru termasuk dalam kelompok sasaran di tahap ini yang ditargetkan tuntas pada Juni 2021. Total realisasi dari sasaran tahap kedua per 17 Maret adalah 1,88 juta jiwa. Tahap berikutnya masyarakat umum.

Tiga variabel

Aktivistik pendidikan dari Taman Siswa, Darmaningtyas, berpendapat, ada tiga variabel yang semestinya berlaku mutlak dan umum untuk semua

daerah di Indonesia sebelum pembelajaran tatap muka digelar.

Pertama, sekolah yang bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka adalah sekolah di daerah zona hijau atau risiko penularan Covid-19 rendah. Kedua, sekolah harus sudah siap dengan protokol kesehatan. Sekolah ini mencakup pihak manajemen sekolah, guru, dan seluruh pegawai sekolah.

"Ketiga, orangtua murid harus sepakat. Jika ada sebagian kecil dari orangtua murid yang tak sepakat, pendidikan tatap muka bisa terus jalan. Tapi, sekolah wajib memfasilitasi pendidikan murid yang orangtuanya masih tetap menginginkan pembelajaran jarak jauh," katanya.

Hal serupa disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim di sela-sela rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis. Menurut dia, pemerintah memberikan porsi besar kepada orangtua untuk memutuskan anaknya tetap belajar dari rumah atau mengikuti pembelajaran tatap muka di kelas. Selain itu, satuan pendidikan juga wajib memenuhi daftar periksa protokol kesehatan Covid-19 sebelum mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas.

(LAS/MED)